

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Suatu pertumbuhan ekonomi dapat diusahakan oleh pemerintah, salah satunya melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal diharapkan dapat memacu dan menyeimbangkan kondisi usaha, yang pada akhirnya akan menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi sesuai harapan. Kondisi ini mempengaruhi timbulnya peraturan perpajakan pada berbagai kegiatan usaha yang berubah-ubah mengikuti perkembangan dunia usaha. Pemerintah dalam mengikuti perubahan dan perkembangan yang sangat cepat dari dunia usaha, melakukan berbagai kebijakan fiskal yang kadang juga harus berubah sangat cepat pula. Hal ini diperlukan agar dalam dunia usaha dapat lebih memberikan rasa keadilan, memberikan kepastian hukum, terutama dalam kaitannya dengan pajak dan dapat memacu perkembangan ekonomi dengan tetap memperhatikan kesederhanaan penerapan kewajiban dan pengenaan pajak bagi Wajib Pajak.

Kebutuhan keuangan negara setiap tahun semakin besar, dan seiring dengan keinginan pemerintah untuk dapat menghapus hutang luar negeri, perlunya kebijakan-kebijakan baru yang diharapkan dapat memperluas jangkauan subjek maupun objek pajak yang dapat digali oleh pemerintah. Peraturan perpajakan yang berlaku pada berbagai dunia usaha sangat banyak.

Ditinjau dari sudut keuangan negara, pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang sangat potensial. Melalui analisis penyeimbangan

penerimaan dan pengeluaran negara dapat direncanakan jumlah pajak yang akan dibebankan kepada masyarakat wajib pajak. Menurut Sri Mulyani dalam Hirawan (2007) bahwa beberapa tahun terakhir, Ditjen Pajak melakukan ekspansi besar-besaran untuk meningkatkan jumlah wajib pajak potensial. Dalam hal ini, jumlah wajib pajak terus meningkat secara drastis, yaitu berada pada kisaran 100 persen atau lebih. Tentunya, kenaikan jumlah wajib pajak dengan cara seperti ini justru tidak efektif dalam hal kemungkinan peningkatan penerimaan pajak. Permasalahan lain adalah banyaknya penyimpangan-penyimpangan dalam praktek perpajakan. Penyimpangan yang paling sering diangkat adalah adanya kebocoran dalam penarikan pajak. Salah satu di antaranya yaitu potensi dan realisasi penerimaan sangat jauh berbeda, padahal sektor pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama dan hampir 80% adalah dari perpajakan juga adanya penggelapan perpajakan dikarenakan faktor-faktor yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penggelapan pajak telah dipecat sebanyak 30 orang dan 300 orang diberikan peringatan. Di samping itu, kebocoran penerimaan pajak juga diakibatkan oleh Objek Pajak yang harusnya kena pajak tapi tidak kena pajak atau Wajib Pajak yang tidak benar dalam melakukan Surat Pemberitahuan. Contohnya deposito yang seharusnya merupakan Objek Pajak berdasarkan Undang-undang perpajakan tetapi pada saat ini tidak dikenakan pajak. Yang dikenai pajak baru menyangkut bunga deposito saja, nilai deposito per 31 Desember 2003 sebesar 840 Triliun dengan jumlah itu kehilangan penerimaan pajak mencapai 252 Triliun (*web.Depkeu.go.id*).

Target penerimaan pajak pada tahun 2013 belum mencapai target

sebagaimana dikemukakan 30 Agustus 2013, penerimaan pajak yang dapat direalisasikan oleh DJP baru mencapai Rp 556,349 triliun atau sekitar 55,90% ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

**REALISASI PENERIMAAN DJP TA 2013**  
Sampai dengan tanggal 30 Agustus 2013  
( Miliar Rupiah )

BULAN	PENERIMAAN NETO							RESTITUSI				
	PPh		PPN dan PPNBM	PBB	PL	TOTAL Non Migas	Total Penerimaan	PPh	PPN dan PPNBM	PBB	PL	TOTAL
	Non Migas	Migas										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(2)+(4)+(5)+(6)	(8)=(3)+(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(9)+(12)
Januari	29.481,88	0,01	26.844,56	97,17	350,89	56.774,30	56.774,31	5.936,31	3.197,51	0,25	0,10	9.134,17
Pebruari	29.735,57	5.824,14	24.874,35	147,21	378,06	55.136,09	60.960,23	506,80	2.982,08	0,04	0,03	3.578,95
Maret	31.718,97	11.891,75	24.454,25	60,74	414,21	58.657,17	68.548,92	426,23	2.409,30	0,03	0,03	2.835,58
April	52.035,50	0,03	30.469,59	129,25	408,16	83.042,49	83.042,53	2.929,37	3.737,20	0,13	16,17	6.682,87
Mei	26.545,50	8.221,62	31.239,43	200,75	426,20	58.411,87	66.633,49	7.101,88	3.133,74	0,17	6,70	10.242,48
Juni	33.960,04	10.750,28	30.092,94	213,46	413,04	64.679,49	75.429,76	1.700,75	3.527,99	0,04	1,29	5.230,07
Juli	33.416,09	5.780,57	32.625,86	304,13	485,25	66.831,32	72.611,89	5.563,83	4.449,59	0,37	3,44	10.017,23
Agustus	34.908,89	7.169,28	29.462,52	486,01	322,00	65.179,42	72.348,70	1.197,22	4.065,40	4,30	0,48	5.267,41
September												
Oktober												
November												
Desember												
<b>Realisasi Tahun 2013</b>	<b>271.802,24</b>	<b>49.637,69</b>	<b>230.063,49</b>	<b>1.647,72</b>	<b>3.198,69</b>	<b>506.712,15</b>	<b>556.349,84</b>	<b>25.452,37</b>	<b>27.502,82</b>	<b>5,32</b>	<b>28,24</b>	<b>52.988,75</b>
<b>Rencana APBN-P 2013</b>	<b>464.481,88</b>	<b>74.277,98</b>	<b>423.708,25</b>	<b>27.343,80</b>	<b>5.401,98</b>	<b>920.935,92</b>	<b>995.213,90</b>					
<b>% Realisasi 2013 thd. Rencana 2013</b>	<b>58,52</b>	<b>66,83</b>	<b>54,30</b>	<b>6,03</b>	<b>59,21</b>	<b>55,02</b>	<b>55,90</b>					
<b>Realisasi s.d 31 Agustus 2012</b>	<b>255.738,66</b>	<b>51.463,42</b>	<b>204.276,79</b>	<b>5.469,54</b>	<b>2.774,41</b>	<b>468.259,40</b>	<b>519.722,81</b>	<b>16.047,18</b>	<b>23.211,45</b>	<b>7,07</b>	<b>23,68</b>	<b>39.289,38</b>
<b>APBN-P 2012</b>	<b>445.733,43</b>	<b>67.916,70</b>	<b>336.056,98</b>	<b>29.687,51</b>	<b>5.632,00</b>	<b>817.109,92</b>	<b>885.026,62</b>					
<b>% Realisasi 2012 thd. APBN-P 2012</b>	<b>57,37</b>	<b>75,77</b>	<b>60,79</b>	<b>18,42</b>	<b>49,26</b>	<b>57,31</b>	<b>58,72</b>					
<b>Pertumbuhan 2012 - 2013</b>	<b>6,28%</b>	<b>-3,55%</b>	<b>12,62%</b>	<b>-69,87%</b>	<b>15,29%</b>	<b>8,21%</b>	<b>7,05%</b>	<b>58,61%</b>	<b>18,49%</b>	<b>-24,77%</b>	<b>19,24%</b>	<b>34,87%</b>

Sumber Data : Laporan Rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2013 - DJPb

Realisasi penerimaan pajak berdasarkan data DU/Pb - Dit. PKP - 06/09/2013 - 12/64

Sehubungan dengan pentingnya peran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam meningkatkan perekonomian rakyat Indonesia, maka diperlukan suatu sistem dan prosedur yang efektif dan efisien mengenai pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk mengamankan penerimaan pajak.

Adanya kasus korupsi pegawai pajak berimbas pada wajib pajak. Imbas kasus mafia pajak perlu kedewasaan. Terlalu naif bila dikait-kaitkan dengan pelaksanaan kewajiban pajak. Dalam berbagai kesempatan, isu itu diperbesar untuk menjustifikasi dan mencari-cari argumen untuk tidak patuh pajak. Aktivis ICW Febri Diansyah (20/1) menulis bahwa dalam kasus pajak, satu langkah atau

babak baru sudah dimulai. Tidak fair rasanya jika satu orang oknum kemudian digeneralisasikan dengan semua petugas pajak. **Kombinasi Strategi** Data DJP Kementerian Keuangan mencatat pada 2009 rasio kepatuhan WP sebanyak 5.413.114 atau 52,61% dengan jumlah WP terdaftar sebanyak 10.289.590 WP. Pada 2010, rasio kepatuhan WP dalam menyampaikan SPT Tahunan hingga April 2010 telah mencapai 54,84% atau 7,73 juta WP. <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=275176>

Sistem Informasi Akuntansi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penerimaan tersebut perlu diamankan dari segala kemungkinan yang terjadi dari segala kemungkinan yang terjadi yang dapat merugikan Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Salah satu syarat bagi berhasilnya suatu pengamanan penerimaan pajak antara lain sangat ditentukan oleh berfungsinya kualitas Sistem Informasi Akuntansi dalam menyajikan suatu informasi.

Dengan adanya masalah-masalah yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam mengendalikan kegiatan kantornya semakin meningkat dan kompleks karenanya dibutuhkan informasi yang benar, jelas, dan tepat waktu (aktual). Informasi yang diolah dengan baik akan menghasilkan berbagai informasi yang berguna dan berkualitas untuk mencapai tujuan pengendalian suatu penerimaan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Desiana Wulandari pada tahun 2010, dengan judul PENGARUH PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK

PERTAMBAHAN NILAI (Studi Penelitian Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Selatan).. Populasi penelitiannya dengan jumlah responden sebanyak 40 orang untuk pengisian kuesioner. Dan jumlah sampel yang diambil sebesar 50% dari jumlah populasi sebanyak 40 orang pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Selatan. Sampling yang digunakan metode *probability sampling* jenis sampling acak sederhana (random). Untuk uji hipotesis penelitian ini dilakukan dengan korelasi *Rank Spearman* yang kemudian dilanjutkan dengan uji t. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan sistem informasi akuntansi yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak merupakan pengorganisasian dari sumber daya manusia, alat, dan metode yang dilaksanakan secara berurutan oleh berbagai bagian yang terkait sehingga menghasilkan informasi yang efektif, relevan dan tepat waktu.

Adapun pengembangan yang dilakukan oleh penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau ketentuan tertentu sesuai dengan bidangnya yang dianggap lebih kompeten dan berpengalaman, sehingga diharapkan dapat memberikan suatu informasi serta kontribusi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Keunggulan dari *purposive sampling* bahwa sampel penelitian benar-benar mengerti tentang permasalahan penelitian yang dilakukan dibandingkan dengan *probability sampling*, sampel penelitian belum tentu mengerti semua tentang permasalahan penelitian karena sampel diambil secara acak. Persyaratan yang penulis ambil dalam *purposive sampling* di antaranya yaitu pendidikan minimal D3 bidang akuntansi dan memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun di bidang perpajakan. Selain teknik

sampling yang membedakan dengan penelitian sebelumnya teori kualitas sistem informasi akuntansi dikaji secara lebih mendalam.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PENGARUH PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BOJONAGARA BANDUNG”**..

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka perlu adanya ruang lingkup untuk mempermudah penjelasan. Dalam penelitian ini penulis membuat batasan ruang lingkup atau mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Informasi Akuntansi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara Bandung.
2. Bagaimana pengamanan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara Bandung.
3. Seberapa besar pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dalam menunjang pengamanan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara Bandung.

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian yang dilakukan penulis adalah menguji seberapa

besar pengaruh sistem informasi akuntansi dalam menunjang pengamanan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Mengadakan studi perbandingan untuk mengetahui relevansi antara teori yang ada dengan praktik yang sebenarnya tentang peranan kualitas sistem informasi akuntansi dalam menunjang pengamanan penerimaan pajak pertambahan nilai. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar S1.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengamanan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara Bandung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar Pengaruh Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi dalam Menunjang Pengamanan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara Bandung.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Setiap penelitian tentunya diharapkan berguna baik untuk peneliti sendiri maupun pihak lain yang akan menggunakan hasil penelitian tersebut. Semua informasi yang akan diperoleh dari hasil penelitian diharapkan akan berguna:

### **1.4.1 Kegunaan Praktis**

Penulis mengharapkan agar penelitian ini berguna bagi semua pihak yang berkepentingan di antaranya sebagai berikut:

1. Penulis
  - a. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian Sidang Skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung.
  - b. Untuk menambah wawasan dan meningkatkan pengetahuan serta penerapannya khususnya mengenai peranan sistem informasi akuntansi dalam menunjang pengamanan penerimaan pajak.
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara Bandung  
Diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak sebagai suatu masukan yang positif dalam merumuskan kebijakan serta tindakan-tindakan selanjutnya yang berhubungan dengan kualitas Sistem Informasi Akuntansi dalam menunjang pengamanan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
3. Pihak Lain  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dari dokumen untuk melengkapi sarana yang dibutuhkan dalam penyediaan bahan studi bagi pihak-pihak yang mungkin membutuhkan.

### **1.4.2 Kegunaan Teoritis**

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung

pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu akuntansi, khususnya mengenai peranan sistem informasi akuntansi dalam menunjang pengamanan penerimaan pajak.

2. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan agar terdapat kesesuaian antara teori dan praktek.